



Judul : Kirim Ratusan Prajurit ke Papua, Andika Bukan Mau Perang
Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 dan 8

KIRIM RATUSAN PRAJURIT KE PAPUA Andika Bukan Mau Perang

PANGLIMA TNI Jenderal Andika Perkasa mengirim 400 prajurit ke Papua. Namun, para prajurit ini dikirim bukan untuk perang. Para prajurit itu ditugaskan untuk menjalankan operasi pembinaan teritorial.

Pengiriman 400 prajurit itu, dilakukan kemarin. Para prajurit itu berasal dari Batalyon Infanteri Raider 142 Ksatria Jaya Kodam II/Sriwijaya dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas (Satgas) organik. Mereka yang tergabung di bawah kendali operasi (BKO) itu, diberangkatkan dari Dermaga Pelabuhan Boom Baru, Palembang, Sumatera Selatan.

Menurut Pangdam II/Sriwijaya Mayjen Agus Suhardi, keberangkatan ratusan prajurit itu, menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Teluk Bintuni-520. "Mereka bertugas selama sembilan bulan ke depan," ujar Agus, kemarin.

Agus menerangkan, visi yang diemban para prajurit itu bukan untuk perang. Melainkan aksi perdamaian. "Jadi, pola operasi yang dilakukan TNI saat ini tidak lagi menggunakan pola operasi tempur, tapi menggunakan pola operasi pembinaan teritorial," terangnya.

Menurut Agus, para prajurit ini akan mengajak seluruh pihak yang

berseberangan dengan negara di Papua, untuk kembali ke pelukan bumi pertiwi. "Prajurit yang ditugaskan ke Papua ini nantinya akan melaksanakan komunikasi sosial untuk mendorong, menggugah, serta membangkitkan pihak-pihak yang tidak sependapat bergabung dengan Papua, agar segera bergabung dengan Papua," ungkapnya.

Dia lalu berbicara mengenai keanekaragaman NKRI. Termasuk di tanah Papua. Menurutnya, Papua sama dengan daerah lain. Makanya, yang harus dilakukan adalah membangun Papua agar lebih maju. "Bagi pihak yang sudah bergabung dengan Papua, mari secara bersama-sama meningkatkan Papua agar lebih maju lagi dari sekarang," serunya.

Agus menambahkan, para prajurit yang ditugaskan ke Papua telah menjalani pelatihan panjang selama setahun terakhir di kesatuan. "Selanjutnya, prajurit ini akan menjalani latihan khusus yang diberikan selama sebulan penuh yang disesuaikan dengan daerah Papua. Mulai dari pemetaan wilayah, adat istiadat, dan sebagainya," papar Agus.

Langkah ini mendapat sambutan hangat dari DPR. Anggota Komisi I DPR Dave Laksono yakin, para prajurit TNI tersebut mampu menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Tanpa harus ada pertumpahan darah. "Tentunya personel TNI yang akan ditempatkan

diharapkan bisa membawa angin segar dalam penyelesaian konflik di Papua," ujar politisi muda Partai Golkar itu, kemarin.

Dengan langkah ini, dia berharap perdamaian Papua bisa dicapai. "Tentara yang baru tiba dengan strategi yang berbeda diharapkan bisa lebih menciptakan sikon yang lebih baik. Sehingga janji Panglima di DPR bisa terealisasi," ucapnya.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Andika menyatakan tidak akan mengangkat senjata dalam menyelesaikan konflik Papua. Dia memilih memanfaatkan operasi pembinaan teritorial dan mengedepankan komunikasi kepada masyarakat Papua.

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati mendukung upaya Andika yang mengedepankan pembinaan teritorial dalam mengatasi konflik Papua. Pemodelan yang diterapkan Andika merupakan langkah diplomasi damai menyentuh pikiran dan hati rakyat Papua. "Langkah Panglima TNI sudah benar karena kita bukan dalam rangka memerangi negara atau bangsa lain," ucap Nuning, sapaan Susaningtyas.

Dia berharap, masyarakat memahami hal tersebut. "Yang kita perangi adalah pemikiran separatisme yang tumbuh di tengah OAP (Orang Asli Papua) atas pengaruh luar dengan segala kepentingan ingin menguasai Papua,"

terangnya.

Sedangkan, pengamat militer dan intelijen dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Robi Sugara menerangkan tugas-tugas pokok TNI. Dia bilang, militer bukan hanya digunakan untuk berperang, tapi bisa juga untuk menjaga perdamaian. "Itu yang kita kenal sebagai *peace keeping*," sebut Robi.

Robi menambahkan, kasus yang terjadi di Papua, negara tidak sedang berkonflik dengan pihak luar, melainkan dengan warganya sendiri. "Nah, militer di sini diturunkan untuk mengikuti kebijakan politik Pemerintah menyelesaikan konflik separatisme di Papua. Itu yang benar," imbuh pengajar keamanan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Jakarta itu. ■ UMM